

# **Petisi Masyarakat Sipil Indonesia Kepada Parlemen Uni Eropa Tentang Kebijakan Biofuel Eropa**

**Jakarta, Indonesia  
September, 2013**

Pada tanggal 11 September 2013, Parlemen Uni Eropa akan bersidang untuk memutuskan perubahan penting terhadap kebijakan bahan bakar nabati (biofuels) Uni Eropa. Jika tidak dilakukan tindakan untuk membatasi permintaan atas biofuels, maka kebijakan ini akan mengakibatkan dampak negatif yang sangat besar bagi masyarakat dan lingkungan hidup di negara-negara produsen seperti Indonesia yang menanam komoditas biofuel untuk pasar Eropa.

Minyak kelapa sawit yang diproduksi di Indonesia dan Malaysia terus mengalami peningkatan untuk memenuhi kebutuhan biodiesel demi pencapaian target Uni Eropa. Pada saat yang sama, biofuel juga menjadi bagian yang penting dalam rencana pemerintah mengembangkan industri kelapa sawit, dengan perkiraan peningkatan luas perkebunan kelapa sawit dari 11 juta hektar menjadi 28 juta hektar di tahun 2020.

Kami, masyarakat sipil Indonesia, menyerukan kepada Parlemen Eropa untuk tidak menutup mata terhadap berbagai dampak buruk dari produksi komoditas biofuel di negara-negara produsen seperti Indonesia. Target yang ditetapkan melalui kebijakan biofuel ini akan mendorong terus terjadinya ekspansi industri perkebunan monokultur skala besar, seperti kelapa sawit, yang berarti terus berlanjutnya berbagai masalah lingkungan hidup, sosial dan ekonomi bagi jutaan masyarakat Indonesia.

Industri perkebunan kelapa sawit skala besar telah menimbulkan berbagai masalah serius bagi komunitas-komunitas dan lingkungan hidup di Indonesia, juga di negara-negara produsen lainnya. Beberapa masalah utama adalah:

Perkebunan kelapa sawit skala besar merupakan salah satu kontributor terbesar pelepasan gas rumah kaca Indonesia akibat penggundulan hutan, pembakaran lahan dan pengeringan lahan gambut. Oleh karenanya, biofuel yang berasal dari minyak sawit tidak akan bisa menurunkan emisi gas rumah kaca, sebaliknya, malah akan meningkatkan emisi gas rumah kaca.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar juga telah mengakibatkan perampasan lahan masyarakat adat dan masyarakat lokal, konflik, serta pelanggaran HAM oleh aparat negara. Tidak diakuiinya hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas tanah telah menimbulkan berbagai konflik antara masyarakat dan perusahaan, yang seringkali berakhir pada tindak kekerasan aparat pemerintah yang mendukung perusahaan.

Sistem perkebunan kelapa sawit skala besar tidak menghormati hak-hak pekerja, menimbulkan ketidakadilan gender, serta sering melibatkan anak-anak dalam proses produksinya yang mengakibatkan anak-anak kehilangan haknya untuk sekolah. 80 persen pekerja di perkebunan kelapa sawit skala besar --laki-laki dan perempuan, adalah buruh harian lepas (BHL) yang tidak mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan kerja, dan dibayar dengan upah yang sangat murah yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar menyebabkan hilangnya kedaulatan pangan masyarakat-masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan sebagai sumber pangan dan penghidupannya. Banyak perusahaan kelapa sawit skala besar menghancurkan lahan, hutan serta wilayah pesisir yang subur dan menggantinya dengan tanaman monokultur kelapa sawit.

Kami, masyarakat sipil Indonesia, sangat khawatir dengan adanya kebijakan biofuel dalam Uni Eropa yang akan mengakibatkan dampak negatif yang sangat besar terhadap jutaan masyarakat Indonesia dan gagal menurunkan emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim.

Oleh karenanya, kami, masyarakat sipil Indonesia, menyerukan kepada Uni Eropa untuk:

1. Tidak menggunakan biofuel yang berasal dari perkebunan monokultur skala besar
2. Tidak menggunakan biofuel yang berasal dari pembukaan hutan alam dan lahan gambut
3. Tidak menggunakan biofuel yang berasal dari lahan-lahan yang berkonflik dengan masyarakat lokal
4. Tidak menggunakan biofuel yang berasal dari perusahaan yang terlibat praktik pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran hak pekerja, hak perempuan, dan di dalam proses produksinya terdapat keterlibatan anak-anak.
5. Mengurangi konsumsi minyak sawit Eropa dan segera menghentikan penggunaan minyak sawit untuk biofuel.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. WALHI (WahanaLingkunganHidup Indonesia) – Friends of the Earth Indonesia
2. SawitWatch (Oil Palm Watch)
3. AMAN (Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago)
4. AMAN Central Kalimantan
5. KpSHK (the Supporting Consortium for Community-based Natural Resources Management)
6. FWI (Forest Watch Indonesia)
7. KIARA (Indonesian Fishery Justice Coalition)
8. SBIB (Indonesian Shout)
9. ADS (The Indonesian Alliance for Prosperous Village)
10. KRKP (Peoples' Coalition for Food Sovereignty)
11. JKPP (Participatory Mapping Network)
12. HuMA (The Indonesian Institute for Law and Community)

13. E-Law Indonesia
14. RMI (Young Forester Indonesia)
15. Save Our Borneo
16. YBB (Betang Borneo Foundation)
17. FOKER SHK (Working Group on Community Forest System)
18. PerkumpulanMenapak, East Kalimantan
19. Nurani Perempuan, East Kalimantan
20. FOKER LSM Papua (Papuan NGO Working Group)
21. PADI, East Kalimantan
22. WALHI South Kalimantan
23. WALHI East Kalimantan
24. WALHI West Kalimantan
25. WALLACEA
26. Kelopak Foundation, Bengkulu
27. Perkumpulan PUSAR, Central Sulawesi
28. FNPF (Friends of the National Park Foundation)
29. WALHI Jambi
30. WALHI Riau
31. Perkumpulan ROA, Central Kalimantan
32. Perkumpulan Hijau, Jambi
33. PUSAKA Foundation
34. TuK INDONESIA (Transformation for Justice Indonesia)
35. WALHI North Sulawesi
36. WALHI Lampung
37. JMG-J (Peatland Community Alliance Jambi)
38. WALHI Central Sulawesi
39. WALHI North Maluku
40. WALHI East Java
41. WALHI Central Kalimantan
42. Institut Dayakologi, West Kalimantan
43. Pancur Kasih Foundation, West Kalimantan
44. PPSDAK Pancur Kasih, West Kalimantan
45. Lembaga Bela Banua Talino, West Kalimantan
46. Lembaga Gemawan, West Kalimantan
47. Lembah Foundation, West Kalimantan
48. Cassia Lestari, West Kalimantan
49. Human Rights Committee of West Kalimantan
50. SHK West Kalimantan
51. Perkumpulan Elpagar, West Kalimantan
52. Riak Bumi Foundation, West Kalimantan
53. PSE KAP, West Kalimantan
54. LPS Air, West Kalimantan
55. AMAN West Kalimantan
56. Lanting Borneo, West Kalimantan

57. Perkumpulan SAMPAN, West Kalimantan
58. Lingkar Borneo, West Kalimantan
59. Institut Manua Punjung, West Kalimantan